

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Isu lingkungan hidup semakin menjadi hal yang penting untuk dibahas. Masalah lingkungan hidup semakin kompleks dan terus memunculkan isu-isu baru. Masalah lingkungan hidup ini menjadi ancaman bagi kehidupan manusia di masa mendatang. Hal tersebut diperburuk dengan meningkatnya populasi dunia, sumber daya alam yang semakin menipis, eksploitasi manusia secara masif terhadap alam yang mengakibatkan turunnya kualitas hidup alam, serta meningkatnya konsumsi manusia terhadap barang-barang yang menimbulkan sampah (Rambe *et al.*, 2021). Tindakan tersebut pada akhirnya menyebabkan berbagai permasalahan global, seperti perubahan iklim, efek rumah kaca, wabah penyakit, dan kerusakan ekologis yang pada akhirnya dapat mengancam keberlangsungan manusia.

Masalah yang dihadapi oleh dunia saat ini adalah hasil pembuangan oleh manusia atau sampah yang semakin menumpuk dan tidak terkendali. Pada dasarnya, semua orang akan menghasilkan sampah setiap hari, baik organik maupun anorganik. Sampah adalah masalah yang umum di berbagai negara di seluruh dunia yang tidak habis-habisnya. Menurut laporan dari Bank Dunia, jumlah sampah akan terus meningkat dan mayoritas kenaikan akan terjadi pada negara-negara berkembang (Amalia dan Putri, 2021).

Sampah terbagi menjadi dua kategori: organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami dan mudah terurai atau membusuk dalam waktu yang singkat. Contoh sampah organik termasuk sisa makanan, sayuran, buah, dan ikan, serta sisa kebun (daun, ranting, dan rumput). Jika dikelola dengan baik, sampah organik ini tidak akan mencemari lingkungan dalam jangka waktu yang lama. Sampah anorganik merupakan sampah dari bahan yang tidak dapat terurai atau membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat terurai. Sampah anorganik biasanya berasal dari bahan-bahan, seperti plastik, kaca, dan logam. Umumnya sampah anorganik berasal dari aktivitas manusia, seperti kemasan produk dan elektronik. Sifat yang sulit terurai seringkali menimbulkan permasalahan lingkungan, seperti pencemaran tanah, air, dan udara apabila tidak

dikelola dengan baik (Febriadi, 2019). Sampah anorganik yang sulit terurai dapat diatasi dengan cara mendaur ulang menjadi bahan atau barang yang lebih berguna.

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2022-2024

JUMLAH PENDUDUK INDONESIA		
TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	LAJU PERTUMBUHAN (%)
2021	272.682.500 Jiwa	1,22
2022	275.773.800 Jiwa	1,17
2023	278.696.200 Jiwa	1,13

(Sumber : Badan Pusat Statistika Indonesia/2023)

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2021 adalah 272.682.500 jiwa, meningkat 1,22% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, jumlah tersebut meningkat menjadi 275.773.800 jiwa, meningkat 1,17% dari tahun 2021. Kemudian, pada tahun 2023 jumlah penduduk Indonesia mengalami kenaikan kembali sebanyak 1,13% dengan jumlah 278.696.200. Jumlah penduduk yang semakin meningkat ini sebanding dengan jumlah sampah yang dihasilkan di Indonesia. Hal ini diperkuat oleh Martini dan Windarto (2020), bahwa Indonesia adalah penyumbang sampah terbesar kedua di dunia. Indonesia akan menghasilkan timbulan sampah sebesar 39.737.086,45 ton pada tahun 2023, menurut data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. Sebagian besar dari sampah tersebut merupakan jenis sampah plastik karena sifatnya yang sulit untuk terurai. Dampak dari tingginya timbulan sampah adalah pencemaran terhadap lingkungan yang mengakibatkan berbagai permasalahan, seperti banjir, kerusakan ekosistem, penurunan kualitas air, dan penurunan kesehatan masyarakat (Rahmah *et al.*, 2021). Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menurunkan atau menekan timbulan sampah, yaitu dengan pembuatan kebijakan pengelolaan sampah, menerapkan pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), program bank sampah di berbagai daerah, bahkan hingga upaya ekspor sampah ke negara lain. Tingginya angka timbulan sampah tersebut dikarenakan banyak tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Indonesia, seperti kurangnya kesadaran masyarakat terkait lingkungan, terbatasnya fasilitas pengelolaan sampah, dan

penegakan hukum yang lemah bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap kebijakan pengelolaan sampah.

Jumlah sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat membahayakan lingkungan, terutama di kota. Ada berbagai faktor yang membuat volume sampah bertumpuk, seperti perubahan gaya hidup, urbanisasi, pertambahan populasi penduduk, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan (Komarudin *et al.*, 2023). Salah satu solusi yang efektif untuk mengatasi masalah ini adalah pemberdayaan masyarakat. Mengingat pentingnya pengelolaan sampah, komunitas dapat berpartisipasi dalam memilah, mendaur ulang, dan mengurangi sampah di sumbernya. Dengan demikian, masyarakat tidak mengandalkan pemerintah untuk menjaga lingkungan.

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Jawa Tengah Tahun 2021-2023

JUMLAH PENDUDUK JAWA TENGAH	
TAHUN	JUMLAH PENDUDUK
2021	36.742.501 Jiwa
2022	37.032.410 Jiwa
2023	37.540.962 Jiwa

(Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional 2023)

Penduduk Provinsi Jawa Tengah meningkat setiap tahun. Ini terlihat dalam tabel di atas, yang berasal dari data dari Badan Pusat Statistika, dengan jumlah penduduk 36.742.501 pada tahun 2021. Kemudian, pada tahun 2022 mengalami peningkatan penduduk menjadi 37.032.410 Jiwa. Selanjutnya, berdasarkan data terbaru terakhir pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi sebanyak 37.540.962 Jiwa. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti migrasi penduduk dan tingginya angka kelahiran. Peningkatan penduduk Provinsi Jawa Tengah yang pesat dan signifikan menunjukkan adanya pertumbuhan dalam berbagai segi termasuk jumlah sampah yang terus meningkat.

Menurut Nurdiansyah (2021), mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk memberikan dampak yang sebanding dengan peningkatan jumlah sampah. Hal ini menjadikan, bahwa besarnya sampah yang dihasilkan oleh suatu daerah sebanding dengan jumlah penduduknya. Dalam konteks Provinsi Jawa Tengah, jumlah penduduk sebanding dengan jumlah sampah yang terus meningkat. Tercatat bahwa

pada tahun 2022, timbunan sampah yang dihasilkan oleh Provinsi Jawa Tengah mencapai 5.904.061 ton. Dengan jumlah penduduk yang terus berkembang, maka volume sampah yang dihasilkan juga akan terus bertambah, mengingat konsumsi masyarakat dan aktivitas ekonomi yang semakin intensif. Oleh karena itu, pengelolaan sampah di Provinsi Jawa Tengah menjadi tantangan besar yang memerlukan perhatian serius.

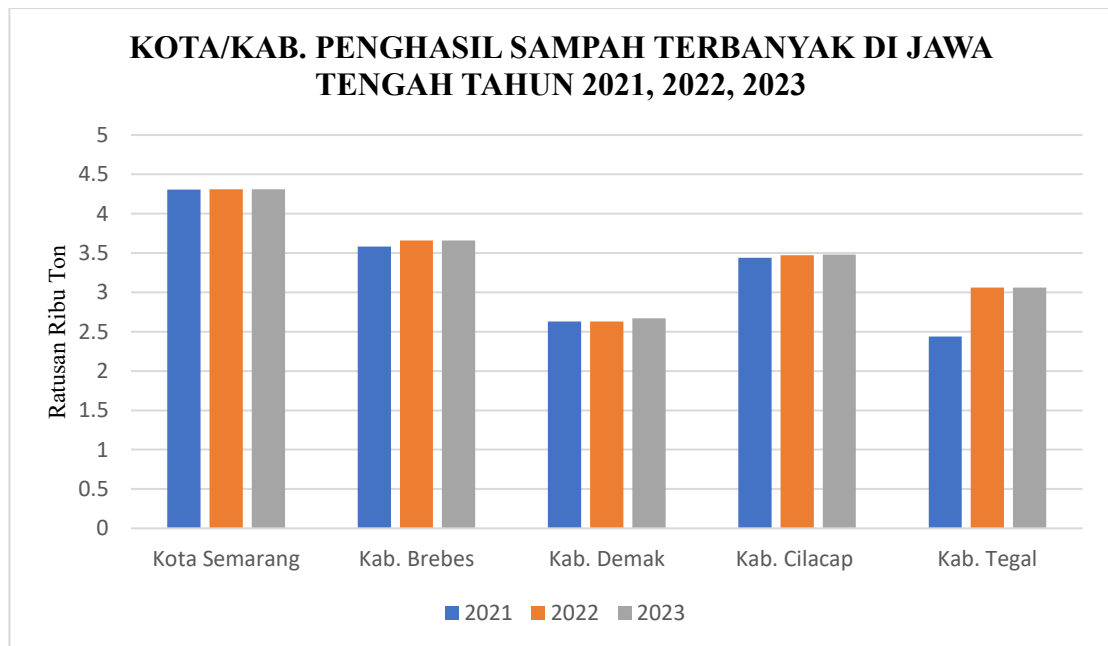
Tabel 1.3. Jumlah Penduduk Kota Semarang

JUMLAH PENDUDUK KOTA SEMARANG	
TAHUN	JUMLAH PENDUDUK
2021	1.656.564 Jiwa
2022	1.659.975 Jiwa
2023	1.694.743 Jiwa

(Sumber : Badan Pusat Statistika Kota Semarang)

Semarang adalah salah satu kota penting di Indonesia dan merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah kota Semarang adalah 373,78 km² dan terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Pada tahun 2023, 1.694.743 orang tinggal di sana. Laju pertumbuhan penduduk Kota Semarang meningkat sebesar 0,25% pada tahun 2021, mencapai 1.659.975, naik lagi sebesar 0,21% pada tahun 2022, mencapai 1.659.975, dan naik lagi sebesar 0,9% pada tahun 2023. Meningkatnya penduduk ini sebanding dengan meningkatnya volume sampah yang semakin banyak akibat dari aktivitas masyarakat yang tinggi dan pola konsumsi yang berubah-ubah sehingga menghasilkan beragam jenis sampah (Putri *et al.*, 2022).

Gambar 1.1. Grafik Kota/Kab. Penghasil Sampah Terbanyak di Jawa Tengah
Tahun 2021-2023



(Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional/2023)

Menurut data, Kota Semarang selalu menjadi kota dengan timbulan sampah tertinggi di Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya. Grafik tersebut membandingkan beberapa kota atau kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan populasi yang sebanding dengan Kota Semarang. Meskipun grafik menunjukkan peningkatan dan penurunan dalam jumlah timbulan sampah, Kota Semarang tetap menjadi kota dengan timbulan sampah tertinggi setiap tahunnya. Hal Ini adalah hasil dari status Kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, pusat ekonomi, industri, dan perdagangan Jawa Tengah, serta pusat wisata. Penduduk yang terus bertambah menyebabkan timbulan sampah meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, diperlukan tindakan nyata dari pemerintah dan terutama masyarakat untuk mengurangi timbulan sampah di Kota Semarang secara signifikan. Salah satu langkah nyata dari masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat dengan mendirikan bank sampah agar sampah dapat terpilah dan terkelola mulai dari tingkat rumah tangga.

Menurut Wartama dan Nandari (2020), Pemberdayaan masyarakat adalah proses di mana masyarakat berusaha untuk melakukan kegiatan sosial yang dapat mengubah kondisi tertentu dan memerlukan partisipasi mereka. Maka dari itu,

untuk mengolah sampah secara efektif dimulai dari masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilahan sampah menjadi langkah awal yang sangat penting dalam mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Melalui pemberdayaan masyarakat, diharapkan akan terbentuk kesadaran kolektif untuk menjaga kebersihan lingkungan dan meminimalisir dampak negatif dari timbunan sampah. Salah satu cara pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi permasalahan sampah adalah dengan adanya bank sampah. Peran pemerintah seharusnya adalah memfasilitasi masyarakat untuk mendukung program bank sampah agar sampah dapat terkelola mulai dari tingkat rumah tangga.

Bank sampah merupakan sebuah konsep pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi volume sampah sebelum dikirim ke tempat pembuangan akhir (TPA) serta meningkatkan nilai ekonomi dari sampah. Menurut Purwaningsih dan Sutrisno (2019), bank sampah mengajarkan cara memilah sampah organik dan anorganik dan mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Melalui program bank sampah, sampah dapat didaur ulang atau dijual sebagai produk olahan, yang menghasilkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap lingkungan. Bank sampah juga berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dengan menjaga lingkungan dan mengolah sampah dengan maksimal. Hal tersebut didukung oleh Suprihatin *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa Bank sampah adalah salah satu inovasi sosial yang berhasil mengubah perspektif orang tentang pengelolaan sampah.

Bank sampah sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dan pemerintah setempat. Menurut Suryani dan Nugroho (2020), menunjukkan bahwa faktor sosial seperti kesadaran lingkungan, motivasi ekonomi, dan kebijakan yang mendukung menjadi faktor utama dalam optimalisasi fungsi bank sampah. Bank sampah tidak hanya mengurangi jumlah sampah, tetapi juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wulandari *et al.* 2018). Bank sampah juga memicu kemandirian masyarakat sehingga masyarakat menjadi tidak bergantung pada pihak luar untuk peningkatan kualitas hidup, terutama dalam pengelolaan sampah.

Pada implementasinya, bank sampah masih menghadapi berbagai tantangan. Menurut Pratiwi dan Hadi (2021), kendala utama dalam implementasi bank sampah adalah rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya infrastruktur yang mendukung, dan minimnya insentif ekonomi yang diberikan pada peserta bank sampah. Tantangan lain yang sering dihadapi adalah keterbatasan modal atau dana untuk mengembangkan fasilitas bank sampah. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut dan mengembangkan bank sampah menjadi lebih baik. Kesadaran dan partisipasi masyarakat juga perlu dikembangkan agar bank sampah dapat berjalan dengan optimal. Dengan terciptanya bank sampah yang optimal, dapat menjadikan bank sampah sebagai solusi yang efektif dan efisien dalam mengelola sampah yang berkelanjutan.

Tabel 1.4. Jumlah Bank Sampah Kota Semarang

JUMLAH BANK SAMPAH KOTA SEMARANG	
TAHUN	JUMLAH BANK SAMPAH
2021	47 Unit
2022	225 Unit
2023	497 Unit

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang/2023)

Bank sampah adalah sistem pengelolaan sampah yang mengumpulkan, memilah, dan mendaur ulang sampah yang dibuat oleh orang-orang, terutama rumah tangga. Salah satu inisiatif yang dapat mengubah cara orang melihat pengelolaan sampah adalah ini (Pravasanti dan Ningsih, 2020). Pada umumnya konsep bank sampah ini seperti bank sebenarnya, di mana masyarakat menabung sampah yang kemudian dikembalikan dalam bentuk uang atau yang lainnya. Melalui bank sampah, masyarakat didorong untuk memisahkan sampah organik dan anorganik sejak awal sehingga sampah yang bisa didaur ulang dapat diproses lebih lanjut, sementara sampah yang tidak bisa didaur ulang dapat diolah atau dibuang dengan cara yang lebih ramah lingkungan.

Di Kota Semarang sendiri, bank sampah sudah berkembang setiap tahunnya. Dapat dilihat bahwa jumlah bank sampah selalu meningkat setiap tahun. Bank sampah telah diterapkan di berbagai tingkatan mulai dari komunitas, kelurahan,

kecamatan, hingga yang melibatkan sektor swasta ataupun pemerintah. Bentuk dan konsepnya pun berbagai macam, mulai dari yang jual beli sampah secara sederhana, mengadopsi sistem koperasi, hingga bentuk lainnya yang lebih kompleks. Tujuan utama dari bank sampah di Kota Semarang adalah membuat masyarakat aktif berpartisipasi dalam pengelolaan sampah dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah dari tingkat terendah. Bank sampah merupakan langkah yang positif bagi Kota Semarang untuk menghadapi permasalahan sampah yang kian menumpuk dan tidak terkelola dengan baik. Selain itu, tujuan dari bank sampah adalah agar masyarakat memiliki kebiasaan yang baik dalam mengelola sampah dan menjadikannya berkelanjutan.

Menurut penelitian dari Wicaksono dan Warsono (2020), Bank Sampah Ngudi Lestari merupakan bank sampah yang ada di Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik. Bank Sampah Ngudi Lestari beralamat di Jalan Karangrejo Selatan VI RT 01/RW VII Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Bank Sampah Ngudi Lestari merupakan bank sampah yang menjadi program pertama di Jawa Tengah oleh PT. Pegadaian sebagai bentuk CSR terhadap masyarakat Kelurahan Tinjomoyo yang merupakan bagian dari Program Pegadaian Bersih-Bersih. Bank Sampah Ngudi Lestari ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di masyarakat dengan pemberdayaan masyarakatnya. Perbedaan Bank Sampah Ngudi Lestari ini memiliki suatu keunikan, yaitu sampah yang dikumpulkan diubah menjadi emas, yang artinya tabungan sampah masyarakat pada akhirnya akan ditukarkan dengan emas.

Menurut hasil penelitian oleh Wicaksono dan Warsono (2020) Bank Sampah Ngudi Lestari belum optimal dalam pemberdayaan masyarakatnya, karena partisipasi hanya sampai tingkat RT dan RW. Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah juga masih kurang. Masyarakat masih sering menyepelekan program ini sehingga berdampak terganggunya proses pengelolaan di Bank Sampah Ngudi Lestari. Permasalahan lainnya juga masih terjadi, seperti terbatasnya pengetahuan akan teknologi, pengurus yang sudah berumur, masyarakat yang masih konvensional, dan lain sebagainya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan pengambilan keputusan dari

masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, pemecahan solusi, dan menentukan keputusan. Pemberdayaan melalui partisipasi, melibatkan peningkatan kepentingan melalui akses terhadap sumber daya, pengetahuan, dan peluang ekonomi yang berdampak pada kemandirian, daya saing, dan manajemen pembangunan dalam masyarakat. Pemberdayaan yang diteliti dalam penelitian ini adalah tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto dan Soebianto (2019), menjelaskan bahwa terdapat lima tahapan pemberdayaan masyarakat, yaitu tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, tahap pemberian akses, tahap pendampingan, dan tahap kemampuan mandiri.

Pemberdayaan masyarakat juga harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi di era digital saat ini. Menurut Marini *et al.* (2024), salah satu ciri penting pemberdayaan di era digital adalah tersedianya akses terhadap teknologi dan informasi. Pemanfaatan teknologi dapat membuka akses baru terhadap pengetahuan dan jaringan yang lebih luas. Program pemberdayaan yang terintegrasi dengan platform digital dapat membuat pemberdayaan lebih efisien. Di sisi lain, akan muncul suatu permasalahan baru, yaitu kesenjangan digital. Dengan demikian, kesenjangan digital harus diatasi agar tidak menciptakan permasalahan baru dan membuat pemberdayaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pemberdayaan juga perlu mempertimbangkan pada aspek lingkungan hidup. Masyarakat perlu didorong untuk menjadi pelaku utama dalam menjaga dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan agar tidak merusak ekosistem yang semakin parah. Hal ini diperkuat oleh Purwendah *et al.* (2022), bahwa perlunya mengedukasi masyarakat tentang masalah lingkungan yang kompleks yang disebabkan oleh sampah, sehingga masyarakat harus menjadi sadar akan masalah lingkungan. Pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat telah terbukti mampu meningkatkan kesadaran sekaligus kesejahteraan masyarakat lokal.

Pemberdayaan masyarakat pada bank sampah menjadi sarana strategis untuk meningkatkan kesadaran, keterampilan, dan kemandirian warga. Hal ini diperkuat oleh Arrobi *et al.* (2023), mengatakan bahwa Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian mereka. Melalui pendekatan partisipatif membuat masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga menjadi subjek aktif dalam pemberdayaan masyarakat. Permasalahan

yang sering terjadi dalam tahapan pemberdayaan masyarakat adalah pada tahap penyadaran. Partisipasi yang rendah dan kesadaran masyarakat yang kurang menjadi suatu permasalahan. Rendahnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah sering menyebabkan kurangnya antusiasme masyarakat untuk terlibat. Permasalahan yang terjadi dapat mengganggu pemberdayaan masyarakat pada tahap selanjutnya.

Permasalahan pemberdayaan juga dipengaruhi oleh aspek eksternal, seperti kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dan kurangnya sinergi antar *stakeholder*. Hal ini dinyatakan oleh Devi *et al.* (2024), bahwa tantangan yang dihadapi pemberdayaan biasanya yaitu kurangnya dukungan dari pihak pemerintah dan minimnya fasilitas yang mendukung. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pihak, seperti masyarakat, pemerintah, swasta, dan organisasi lainnya. Sangat penting untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada setiap tahapan pemberdayaan masyarakat guna merumuskan strategi yang dapat diterapkan untuk perbaikan. Melihat dari kompleksitas dan pentingnya pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan komitmen jangka panjang dari berbagai pihak untuk tetap mengembangkan model pemberdayaan yang inovatif, adaptif, dan inklusif. Pemberdayaan bukanlah proses yang instan, tetapi membutuhkan waktu dan proses panjang yang berkelanjutan. Ketika masyarakat benar-benar diberdayakan, maka mereka mampu menciptakan suatu pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Kepadatan penduduk menyebabkan tingginya timbulan sampah dan rendahnya kesadaran pengelolaan sampah di masyarakat
2. Program bank sampah yang belum maksimal dalam menekan jumlah timbulan sampah
3. Permasalahan dalam pemberdayaan masyarakat yang menghambat masyarakat untuk menjadi mandiri dan berdaya
4. Kunikan yang dimiliki oleh Bank Sampah Ngudi Lestari, yaitu hasil tabungan sampah dapat ditukarkan dengan emas.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat di Bank Sampah Ngudi Lestari Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang?
2. Apa saja aspek pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat di Bank Sampah Ngudi Lestari Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pemberdayaan masyarakat di Bank Sampah Ngudi Lestari Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
2. Menganalisis aspek pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat di Bank Sampah Ngudi Lestari Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain dibagi menjadi 2 (dua), yaitu secara Teoritis dan Praktis :

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan bank sampah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penelitian lain dan dijadikan acuan untuk studi-studi selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan memperdalam ilmu dan pengalaman di bidang akademis, serta memberikan pemahaman kepada peneliti mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembaca lebih banyak pengetahuan dan perspektif serta menjadi sumber referensi bagi peneliti lain

yang akan mengkaji pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah.

1.6. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian tidak dapat berdiri sendiri, dibutuhkan penelitian terdahulu untuk membangun pengetahuan di atas fondasi penelitian terdahulu yang kokoh. Berikut penelitian terdahulu yang peneliti gunakan dalam penelitian :

Tabel 1.5. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti/Tahun/Judul	Metode dan Teori yang digunakan	Hasil Penelitian
1.	Fitria Ayuningtyas Hidayatullah & Tri Suminar. (2021). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Candi Plaosan Melalui Program Desa Wisata Untuk Kemandirian Ekonomi di Desa Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teori strategi pemberdayaan masyarakat dikemukakan oleh Mardikanto (2017), yaitu: 1. Pengembangan SDM 2. Pengembangan kelembagaan 3. Pengembangan usaha produktif 4. Pengembangan modal masyarakat 5. Penyediaan informasi tepat guna	Ditemukan bahwa pendekatan pemberdayaan menggunakan lima fase, meliputi pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan kelompok, pemupukan modal masyarakat, pertumbuhan perusahaan yang sukses, dan penyediaan informasi penting. Penerapan pemberdayaan melalui fase pengayaan, transformasi, dan penyadaran. Partisipasi dalam masyarakat ialah salah satu karakteristik yang mendukung pemberdayaan. Masyarakat yang belum mengenal pariwisata menjadi hambatan.
2.	Wegi Trio Putra & Ismaniar. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui	Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teori proses pemberdayaan	Menunjukkan bahwa Bank Sampah Panca Daya di Kecamatan Kuranji Kota Padang merupakan salah satu

No.	Peneliti/Tahun/Judul	Metode dan Teori yang digunakan	Hasil Penelitian
	Pengelolaan Sampah di Bank Sampah.	masyarakat oleh Mardikanto dan Soebianto (2013), yaitu: 1. Pemungkinan 2. Penguatan 3. Perlindungan 4. Penyokongan 5. Pemeliharaan	lembaga pemberdayaan masyarakat yang mampu meningkatkan jumlah nasabah bank sampah secara signifikan. Hal tersebut dapat terjadi karena Bank Sampah Panca Daya menerapkan 5 (lima) tahapan proses pemberdayaan menurut Mardikanto dan Soebianto (2013) dengan hasil temuan penelitian, antara lain melakukan penyadaran, memberikan edukasi, memberikan rasa aman, memberikan bimbingan, serta menjaga hubungan baik dengan nasabah dan komunikasi yang baik.
3.	Tiara Khairina Bella, Nina Widowati, dan Maesaroh. (2022) Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bank Sampah 'Gedawang Asri' Kelurahan Gedawang Kecamatan Tembalang Kota Semarang	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teori proses pemberdayaan masyarakat melalui 3 tahapan menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007), yaitu: 1. Penyadaran 2. Pengkapasitasan 3. Pendayaan	Menunjukkan bahwa tahapan pemberdayaan masyarakat melalui program Bank Sampah Gedawang Asri masih mengalami adanya permasalahan dalam setiap tahapan pemberdayaan. Dalam tahapan penyadaran, dapat dikatakan belum berjalan dengan optimal karena masih terdapat beberapa masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Bank Sampah Gedawang Asri, kurangnya peran

No.	Peneliti/Tahun/Judul	Metode dan Teori yang digunakan	Hasil Penelitian
			masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, serta belum adanya sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i>. Dalam tahapan pengkapisitan, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat juga dapat dikatakan belum berjalan dengan optimal karena masih terdapat pengelola yang tidak mengikuti koordinasi. Pada tahapan pendayaan belum dapat memberikan daya secara maksimal karena adanya pengaruh finansial yang dinilai belum cukup memberdayakan masyarakat Kelurahan Gedawang dari segi ekonomi.
4.	Ilham Wicaksono dan Hardi Warsono. (2020). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah 'Ngudi Lestari' Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang	Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan adalah fungsi manajemen dalam pemberdayaan masyarakat menurut G.R. Terry (2013), yang meliputi: a. <i>Planning</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen bank sampah di Kelurahan Tinjomoyo cukup baik, tetapi masih kurang maksimal. Faktor - faktor yang mendukung termasuk masyarakat yang terbuka, pelatihan pengelola, arahan yang jelas, fasilitas pendukung, partisipasi masyarakat yang tinggi, dan komunikasi dua arah. Sebaliknya, faktor penghambat yang

No.	Peneliti/Tahun/Judul	Metode dan Teori yang digunakan	Hasil Penelitian
		b. <i>Organizing</i> c. <i>Actuating</i> d. <i>Controlling</i>	ditemukan termasuk pengelola yang sudah tua, ketidakmampuan untuk menggunakan teknologi, cara berpikir konvensional, data yang tidak terupdate, dan tingkat partisipasi masyarakat yang hanya mencapai RT dan RW.
5.	Rizqi Nur Isnaini, Nanik Yuliati, dan Lutfi Ariefianto. (2024). <i>Community Empowerment Strategy Based on Local Potential through the Seed Garden Tourism Village Program in Kediri Regency.</i>	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan adalah pemberdayaan masyarakat oleh Mardikanto dan Soebiato (2019), yaitu: 1. Pembangunan manusia 2. Pengembangan masyarakat 3. Pembangunan kelembagaan kelompok	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan berhasil merubah perekonomian dan pola pikir masyarakat ke arah yang lebih modern. Hal ini tidak lepas dari campur tangan masyarakat yang memiliki wadah organisasi BUMDes. Proses penyadaran masyarakat dilakukan dengan melakukan kegiatan penyuluhan atau <i>workshop</i> terkait pariwisata. Topik utamanya terkait pentingnya kesadaran pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemberian pelatihan kepada peserta disesuaikan dengan latar belakang minat dan bakat yang dimiliki masyarakat.

No.	Peneliti/Tahun/Judul	Metode dan Teori yang digunakan	Hasil Penelitian
6.	Muhammad Supriansyah, Muhammad Riduansyah Syafari, dan Muhammad Anshar Nur. (2022). <i>Community Empowerment Through Waste Bank Program in Mandar Sari, Banjar Regency</i>	Dalam penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Teori yang digunakan adalah tahapan pemberdayaan masyarakat oleh Mardikanto dan Soebianto (2013), yaitu: 1. Penyadaran 2. Penguatan kapasitas	Hasil penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui program bank sampah di Desa Mandar Sari terdiri dari tahap penyadaran dan tahap penguatan kapasitas individu. Pada aspek penyadaran, pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui sosialisasi. Pada aspek penguatan kapasitas individu, pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan individu, kelembagaan, serta jaringan atau <i>system networking</i> .
7.	Nisa Tullatifah. (2020). <i>Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Bank Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Srayan Makarya, Bobosan, Purwokerto Utara, Banyumas)</i> .	Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Teori yang digunakan adalah tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007), yang	Hasil penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat telah terlaksana dengan baik, tetapi masih diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat agar dalam kegiatan bank sampah masyarakat dapat melakukan pengelolaan sampah dengan baik. Selain itu, masih diperlukan adanya pelatihan bagi pengurus agar dapat memengaruhi

No.	Peneliti/Tahun/Judul	Metode dan Teori yang digunakan	Hasil Penelitian
		meliputi tahapan penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan.	dan menarik masyarakat untuk menjadi nasabah bank sampah.
8.	Muhammad Yudha. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Bank Sampah di Dusun Karangploso, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan strategi penelitian lapangan. Teori yang digunakan adalah dimensi pemberdayaan menurut Edi Suharto (2010), yaitu: 1. <i>Enabling</i> 2. <i>Empowering</i> 3. <i>Protecting</i>	Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan bank sampah di Dusun Karangploso, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul berarti bahwa penduduk Dusun Karangploso berpartisipasi dalam proses komunikasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan potensi mereka sambil mempertimbangkan masalah lingkungan sekitar. Oleh karena itu, muncul gagasan untuk mendirikan Bank Sampah Sido Resik dengan tujuan untuk menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat Dusun Karangploso melalui pengelolaan sampah. Bank Sampah Sido Resik menerapkan pemberdayaan melalui pengelolaan sampah organik dan anorganik, dan masyarakat Dusun Karangploso dilibatkan dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah

No.	Peneliti/Tahun/Judul	Metode dan Teori yang digunakan	Hasil Penelitian
			Sido Resik. Ketiga, terdapat kegiatan pemberdayaan masyarakat Dusun Karangploso melalui pengelolaan sampah.
9.	Ashari Kara dan Ety Rahayu. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Binaan PT. Pegadaian Persero Sebagai Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan adalah pemberdayaan masyarakat yang disampaikan oleh Noor (2011), yang menyatakan bahwa <i>empowering</i> berfungsi untuk memperkuat potensi yang ada di masyarakat dengan cara melibatkan peran para pemangku kepentingan untuk dapat menerapkan cara-cara yang nyata dalam menunjang kebutuhan dan perekonomian masyarakat	Menunjukkan bahwa pemberdayaan Bank Sampah Alamanda melibatkan beberapa aspek pemberdayaan masyarakat, yang memenuhi unsur-unsur mendorong, mendorong, dan melindungi pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, ada beberapa elemen di mana penguatan belum dapat dicapai sepenuhnya tanpa bantuan dari pemerintah setempat.

No.	Peneliti/Tahun/Judul	Metode dan Teori yang digunakan	Hasil Penelitian
		kelompok pemberdayaan.	
10.	Widya Ade Lorosae (2021). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Sampah Di Bank Sampah Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur	Metode yang digunakan adalah deskriptif Kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori dimensi pemberdayaan oleh Mardikanto (2017) 1. Bina Manusia 2. Bina Usaha 3. Bina Lingkungan 4. Bina Kelembagaan	Menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah di Bank Sampah Girly Bank Sampah Girly cukup baik dalam membangun manusia, bisnis, dan lingkungan, tetapi kurang dalam membangun kelembagaan. Keterbatasan dana, kurangnya tenaga kerja ahli, dan kurangnya sarana dan prasarana adalah hambatan bagi pemberdayaan ini. Pemerintah Kelurahan Jambangan telah berusaha untuk mengatasi hambatan tersebut dengan bersosialisasi dengan masyarakat dan meminta bantuan dana dari swasta. Penulis mengusulkan agar pemerintah Kelurahan Jambangan melakukan sosialisasi kebersihan yang lebih intens agar masyarakat tertarik untuk berpartisipasi.

Penelitian terdahulu memberikan dasar teoritis dan empiris untuk penelitian ini. Dengan penelitian terdahulu, peneliti dapat menentukan teori yang relevan digunakan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu juga memberikan manfaat pengetahuan bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat

di berbagai tempat sehingga peneliti dapat menentukan permasalahan yang harus diteliti di penelitian ini. Manfaat lain dari penelitian terdahulu adalah menjadikan penelitian terdahulu sebagai acuan dan memperluas perspektif peneliti tentang berbagai pendekatan dan temuan yang belum terpikirkan sebelumnya oleh peneliti.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada lokus penelitian. Lebih spesifiknya, lokasi penelitian yang peneliti ambil, yaitu Bank Sampah Ngudi Lestari yang diprakarsai oleh PT. Pegadaian merupakan bank sampah dengan sistem tabungan sampah yang ditukarkan dengan emas. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang meneliti bank sampah pada umumnya atau memiliki keunikan yang masih umum. Bank Sampah Ngudi Lestari sangat unik karena merupakan *pilot project* di Jawa Tengah oleh PT. Pegadaian sebagai bentuk CSR terhadap masyarakat dalam program Pegadaian Bersih-Bersih.

1.7. Kajian Pustaka

1.7.1. Administrasi Publik

Administrasi Negara atau yang sekarang lebih dikenal dengan administrasi publik yang berasal dari Bahasa Inggris, *public administration*. Perubahan administrasi negara menjadi administrasi publik dikarenakan adanya perubahan orientasi yang sebelumnya berorientasi pada pemerintah menjadi berorientasi pada masyarakat (Hendrayady *et al.*, 2022). Hal tersebut terjadi karena sejatinya administrasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah merupakan kepentingan yang dilakukan untuk masyarakat. Secara etimologis, administrasi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu “*administrare*” yang memiliki arti melayani atau membantu. Kemudian, dalam Bahasa Inggris berasal dari Bahasa Latin, yaitu “*ad*” (*intens*) dan “*ministrare*” (*to serve*) yang keduanya memiliki arti melayani. Hal tersebut dapat diartikan bahwa administrasi publik berarti melayani atau membantu segala kepentingan publik atau masyarakat negara.

Administrasi publik adalah bagian dari administrasi secara luas dan memiliki jangkauan yang lebih besar. Administrasi publik mempelajari tentang ilmu pengetahuan mengenai lembaga terkecil mulai dari keluarga hingga negara bahkan perserikatan bangsa-bangsa, bagaimana lembaga lembaga tersebut digerakkan dan dijalankan (Dimock, 1960, dalam Keban, 2014). Administrasi

publik juga diturunkan dari ibu administrasi dan ayah politik. Dapat disimpulkan bahwa segala kegiatan administrasi yang dilakukan dalam lingkup politik atau pemerintah atau negara merupakan bagian dari administrasi publik (Thoha, 2017). Selain itu, administrasi publik diartikan sebagai organisasi dan manajemen manusia pada pemerinthan untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan (Dwight Waldo, 1971, dalam Pasolong, 2019).

1.7.2. Paradigma Administrasi Publik

Administrasi publik telah mengalami evolusi paradigma dari “dikotomi administrasi” menjadi “administrasi negara” atau administrasi publik yang kita kenal saat ini. Di dalamnya terjadi beberapa kali perubahan paradigma yang terjadi. Para ilmuwan menyepakati gagasan tertentu tentang evolusi paradigma administrasi publik. Pada awalnya Nicholas Henry mengusulkan empat paradigma, tetapi berubah dengan mengakui kehadiran enam paradigma dalam perkembangan paradigma administrasi publik (Henry, 1995, dalam Keban, 2014).

Paradigma pertama, “dikotomi politik-administrasi” dinyatakan oleh Frank J. Goodnow di dalam tulisannya yang berjudul “*Politics and Administration*” pada tahun 1900 bahwa pemerintah memiliki dua fungsi yang berbeda di mana fungsi politik dan fungsi pemerintahan dipisahkan. Pada paradigma ini ditekankan pada tempat di mana seharusnya administrasi publik berada. Ditegaskan oleh Goodnow bahwa administrasi publik harus berfokus pada birokrasi pemerintahan. Kemudian, Woodrow Wilson menyatakan bahwa terdapat empat persyaratan administrasi publik yang efektif: (1) pemisahan politik; (2) pemeriksaan perbandingan organisasi politik dan pihak swasta; (3) peningkatan efisiensi melalui praktik dan sikap berorientasi bisnis dalam operasional sehari-hari; dan (4) peningkatan efektivitas pelayanan publik melalui adanya pelatihan PNS serta peningkatan evaluasi berbasis prestasi (Henry, 1995, dalam Keban, 2014).

Paradigma kedua, “prinsip-prinsip administrasi negara” di mana W. F. Willoughby mengemukakan adanya kepercayaan baru terhadap administrasi publik yang mana memang terdapat prinsip-prinsip administrasi yang mana prinsip tersebut dapat ditemukan (W.F. Willoughby, 1927, dalam Astuti *et al.* 2020). Paradigma ini berfokus pada prinsip-prinsip administratif yang dianggap dapat diterapkan secara universal di berbagai bentuk lingkungan dalam sosial budaya

maupun organisasi. Dengan adanya prinsip-prinsip administrasi yang memang ada dan berlaku di manapun dengan batasan prinsip-prinsip kerja dalam berbagai suasana baik suasana administrasi yang tidak memandang budaya, fungsi, lingkungan ataupun misi maka prinsip-prinsip administrasi tersebut dapat diterapkan di manapun akan dapat berhasil.

Selanjutnya, paradigma ketiga, “administrasi publik sebagai ilmu politik”, pada paradigma ini merupakan sebagian usaha untuk menganalisa antara hubungan administrasi publik dengan ilmu politik. Pada paradigma ini didefinisikan oleh Henry sebagai suatu pendekatan di mana administrasi publik dilihat melalui lensa ilmu politik (Henry, 1995, dalam Keban, 2014). Menurut Henry, memiliki keinginan kuat untuk mengintegrasikan administrasi publik kembali pada bidangnya. Pada saat yang sama, para sarjana manajemen ingin memasukkan administrasi publik ke dalam ilmu manajemen. Sebagai hasil dari upaya transformasi tersebut, paradigma ini mewakili upaya kolaboratif untuk merekonstruksi hubungan koseptual administrasi publik, yang pada akhirnya kembali ke ilmu induknya, yaitu ilmu politik.

Pada paradigma kelima “administrasi publik sebagai administrasi negara” belum ada kesepakatan terkait fokus dan lokus administrasi publik. Herbert Simon mengemukakan bahwa perlunya dua aspek yang perlu dikembangkan dalam ilmu administrasi publik, yaitu administrasi publik lebih memusatkan pada penentuan kebijakan publik memusatkan pada pengembangan ilmu murni administrasi publik dan hampir sebagian besar administrasi publik. Pada aspek pertama terlihat teori-teori selama 20 tahun belakang lebih mementingkan bagaimana dan mengapa organisasi bekerja. Kemudian, pada aspek ke dua dapat dilihat pada kemajuan yang dicapai dalam merencanakan lokus administrasi publik yang relevan mengenai rumusan kepentingan publik, urusan publik, serta kebijakan publik seharusnya dipakai dan dijadikan pegangan bagi praktisi.

Paradigma terakhir “administrasi publik sebagai administrasi publik” sejalan dengan era “manajemen publik baru”. Selama periode ini, administrasi publik diakui sebagai bidang penyelidikan ilmiah yang berbeda, yang dihasilkan dari konvergensi teori ekonom dan metodologi manajemen. Paradigma NPM mewakili pergeseran ke arah penerapan prinsip-prinsip sektor swasta, yang

membawa manajemen sektor publik lebih dekat dengan manajemen sektor swasta melalui penggunaan model untuk bisnis. Tema pokok dari NPM mencakup antara lain, bagaimana memanfaatkan instrumen dan ungkapan di area publik. Hubungan antara organisasi pemerintah dengan klien atau di sini masyarakat dinilai setara dengan interaksi yang dilakukan di dunia pasar.

1.7.3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan sendiri disebut sebagai *empowerment* dalam Bahasa Inggris yang berarti pemberkuasaan. Pemberkuasaan sendiri diartikan sebagai memberikan kekuasaan kepada pihak yang berada di bawah. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan kemandirian masyarakat untuk mengidentifikasi, merencanakan, dan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Menurut Sumaryadi dalam Hannaji *et al.* (2022), pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membangun kekuatan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi mereka dan mengembangkannya. Pemberdayaan masyarakat juga dapat diartikan sebagai alat untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup. Pemberdayaan masyarakat juga mencakup proses pembangunan, sebuah langkah yang diambil oleh masyarakat untuk meningkatkan kondisi masyarakat itu sendiri (Maryani dan Ruth, 2019).

Secara etimologis sendiri, pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang memiliki arti kekuatan atau kemampuan. Dengan konsep tersebut maka pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai suatu proses meningkatkan kemampuan seseorang, memberikan kekuatan kepada seseorang, atau memperkuat pihak yang kurang berdaya oleh pihak yang memiliki kekuatan yang lebih besar (Hidayatullah dan Suminar, 2021). Menurut Sulistiyani dalam Hidayatullah dan Suminar (2021), inti dari pemberdayaan masyarakat terdiri dari tiga hal penting, yaitu pengembangan kemampuan, penguatan potensi, dan pendayaan, serta terciptanya kemandirian masyarakat dengan suatu kewenangan. Pemberdayaan bukan berarti hanya pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, tetapi juga memiliki potensi yang terbatas sehingga mereka dapat berkembang dan tumbuh secara mandiri.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang panjang untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran secara individu dalam kehidupan bermasyarakat. Proses tersebut bertujuan untuk memperkuat peran individu di dalam masyarakat sehingga dapat menjadi pelaku perubahan yang aktif dan berkontribusi secara efektif. Dengan begitu, pemberdayaan masyarakat tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga membangun kemandirian untuk kehidupan berkelanjutan masyarakat.

1.7.3.1. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah membentuk anggota masyarakat menjadi aktor perubahan yang berdaya dan efektif adalah tujuan dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam mengelola kehidupan mereka dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan pasif, tetapi juga diharapkan dapat aktif dalam pengambilan keputusan untuk memperbaiki kehidupan mereka sendiri. Tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan kemandirian, kepercayaan diri, dan partisipasi aktif masyarakat untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat, yaitu: 1) meningkatkan derajat, harga diri, dan kualitas kehidupan manusia dalam segala aspek. 2) ada beberapa prioritas yang harus dicapai agar tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai, yaitu: a) peningkatan kelembagaan. b) peningkatan pendapatan. c) peningkatan lingkungan hidup. d) peningkatan akses. e) peningkatan tindakan. f) peningkatan aspek lainnya yang sesuai dengan masyarakat dan tantangan yang dihadapi (Soleh, 2017).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk merubah kondisi masyarakat agar memiliki kemampuan dan kekuatan di berbagai aspek kehidupan. Hal tersebut diharapkan dapat mengantarkan mereka pada kemandirian, di mana mereka mampu memenuhi kualitas hidup tanpa bergantung pada pihak luar. Dengan menerapkan strategi pemberdayaan yang tepat sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat, proses pemberdayaan dapat lebih efektif dan efisien.

1.7.3.2. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat didasarkan pada sejumlah prinsip yang menjadi landasan untuk mencapai tujuan dari pemberdayaan itu sendiri. Salah satu prinsip yang utama adalah partisipasi masyarakat, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam setiap proses pemberdayaan. Selain itu, prinsip kesetaraan dan keadilan juga penting, di mana semua anggota masyarakat tidak memandang status sosial, gender, atau latar belakang, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaatnya (Ife dan Tesoriero, 2006, dalam Khairunnisa *et al.*, 2025).

Selanjutnya, prinsip pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan potensi lokal, di mana pemberdayaan masyarakat harus mempertimbangkan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat setempat, sehingga dapat memaksimalkan proses pemberdayaan. Prinsip terakhir adalah kemandirian, yang mana merupakan tujuan akhir dari pemberdayaan, di mana masyarakat diharapkan dapat mengelola sumber daya dan menyelesaikan masalah mereka sendiri tanpa bergantung pada pihak luar. Prinsip ini didukung oleh Sulistiyaning dalam Hidayatullah dan Suminar (2021) yang menyatakan bahwa pemberdayaan harus mengedepankan penguatan kapasitas dan potensi masyarakat agar masyarakat dapat menjadi subjek pembangunan, bukan sekedar objek.

1.7.3.3. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat tidak terjadi secara instan, melainkan melalui berbagai tahapan agar pemberdayaan masyarakat dapat terjadi secara sempurna. Ife dan Tesoriero dalam Khairunnisa *et al.* (2025), mengemukakan model pemberdayaan dengan pendekatan hak (*rights-based approach*) tahapan tersebut, yaitu:

1. Pendidikan kritis (*critical education*)

Masyarakat diajak untuk memahami akar masalah melalui pendidikan transformatif.

2. Pengorganisasian masyarakat (*community organizing*)

Membentuk kelompok atau lembaga dalam masyarakat yang kuat.

3. Advokasi

Masyarakat memperjuangkan hak-haknya melalui lobi dan tekanan sosial.

4. Penguatan kelembagaan (*institutional strengthening*)

Memastikan lembaga masyarakat memiliki kapasitas untuk bertahan secara berkelanjutan.

Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebianto (2019) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kemampuan masyarakat untuk menjadi mandiri melalui penguatan potensi lokal. Terdapat lima tahapan menurut teori ini, yaitu:

1. Tahap penyadaran
2. Tahap pengkapasitasan
3. Tahap pemberian akses
4. Tahap pendampingan
5. Tahap kemampuan mandiri

Peneliti menggunakan teori tahapan pemberdayaan masyarakat dari Mardikanto dan Soebianto (2019) dalam penelitian ini karena teori tersebut relevan dengan permasalahan yang diteliti. Teori tersebut lebih berfokus pada kelembagaan masyarakat yang sesuai dengan model pengelolaan Bank Sampah Ngudi Lestari yang berbasis partisipasi dan kemandirian masyarakat. Peneliti menilai bahwa teori tersebut memiliki tahapan yang jelas dan sistematis untuk menganalisis tahapan perkembangan Bank Sampah Ngudi Lestari serta dapat dikombinasikan dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif.

1.7.3.4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Strategi terdiri dari proses dan hasil yang memainkan peran penting dalam mengelola dan mengendalikan aktivitas yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan manfaat dari pencapaian suatu tujuan (Mardikanto dan Soebianto, 2019). Salah satu pendekatan yang berkelanjutan digunakan untuk membuat strategi pemberdayaan masyarakat. Salah satu strategi utama adalah pendidikan dan pelatihan, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat akan potensi mereka. Melalui pendidikan dan pelatihan, masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Masyarakat menjadi lebih mampu dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah mereka sendiri.

Menurut Mardikanto dan Soebianto (2019), terdapat lima program strategi pemberdayaan, yaitu:

1. Pemberdayaan sumber daya manusia melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan untuk pengurus dan anggota. Pengembangan usaha, keterampilan pengelolaan kelembagaan, dan aspek teknis produksi adalah semua topik pelatihan yang diberikan.
2. Pengembangan kelembagaan kelompok, yang mencakup mekanisme organisasi, struktur kepengurusan, sistem administrasi, dan peraturan rumah tangga yang sesuai dengan kebutuhan.
3. Pemupukan modal masyarakat dilakukan dengan membangun hubungan dengan lembaga keuangan lokal dan kelompok memungkinkan dukungan untuk pengumpulan modal yang berkelanjutan.
4. Pengembangan usaha produktif: termasuk pengembangan bisnis dan jasa, strategi pemasaran, dan penyediaan informasi pasar yang relevan.
5. Penyediaan informasi tepat guna, yang mencakup penyebaran program melalui eksposur, buku, dan majalah. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan wawasan dan inspirasi untuk mendorong inovasi yang lebih baik.

1.8. Operasionalisasi Konsep

Pemberdayaan masyarakat Bank Sampah Ngudi Lestari adalah pendayaan masyarakat dengan meningkatkan kapasitas, kemampuan, dan keterampilan untuk mencapai kemandirian yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat Bank Sampah Ngudi Lestari bertujuan untuk menjadikan masyarakat mandiri dalam pengelolaan sampah. Pemberdayaan tersebut dilihat dari beberapa tahap, yaitu:

1) Tahap Penyadaran

Masyarakat diajak untuk membangun kesadaran secara kritis, seperti dengan mengenali potensi sekitar, mengidentifikasi masalah terkait sampah, pengenalan konsep bank sampah, dan lain sebagainya yang meningkatkan kesadaran masyarakat atas lingkungan sekitarnya.

2) Tahap Pengkapasitasan

Pada tahap ini berfokus pada peningkatan kompetensi pada masyarakat. Peningkatan kompetensi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dengan

pelatihan teknis pemilahan sampah, peningkatan kemampuan manajerial, pelatihan finansial, dan segala hal yang berfokus pada peningkatan kompetensi secara teknis, non-teknis, dan secara umum.

3) Tahap Pemberian Akses

Diberikannya akses pada masyarakat terhadap daya dukung sebagai instrumen untuk menciptakan pemberdayaan yang sempurna di masyarakat. Daya dukung juga dapat berupa informasi, alat pemilah atau timbangan, modal usaha, kebijakan yang mendukung, dan segala hal yang bertujuan agar masyarakat dapat memanfaatkan daya dukung secara optimal.

4) Tahap Pendampingan

Pada tahap ini melibatkan pendampingan dari pihak luar atau semua *stakeholder* yang dapat membantu masyarakat dalam mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dengan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian. Pendampingan bisa berasal dari dinas terkait, pemerintah setempat, akademisi, dan lain sebagainya. Pendampingan ini memastikan agar masyarakat dapat berjalan secara mandiri pada tahap selanjutnya.

5) Tahap Kemampuan Mandiri

Tahap ini merupakan akhir dari tahapan pemberdayaan ketika masyarakat telah mencapai kemandirian berkelanjutan dan mampu mengelola sumber daya serta memecahkan masalahnya sendiri tanpa bergantung pada pihak luar. Masyarakat telah memiliki kepercayaan diri, kemampuan, dan jaringan yang kuat untuk menjaga kemandirian secara berkelanjutan.

1.9. Fenomena yang Diteliti

Tabel 1.6. Fenomena yang Diteliti

Konsep	Fenomena	Sub-Fenomena	Gejala
Pemberdayaan masyarakat	Tahapan pemberdayaan masyarakat (Mardikanto dan Soebianto, 2019)	Tahap penyadaran	Masyarakat mulai mengenali dan memahami masalah yang dihadapi
			Masyarakat menunjukkan minat

Konsep	Fenomena	Sub-Fenomena	Gejala
			untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan
			Terjadi diskusi tentang masalah dan solusi yang dilakukan
		Tahap pengkapasitasan	Masyarakat mampu merancang rencana aksi atau program untuk mengatasi masalah
			Adanya peningkatan kemampuan pada masyarakat
		Tahap pemberian akses	Masyarakat mulai mengelola daya dukung secara mandiri
			Masyarakat sudah dapat memanfaatkan daya dukung yang ada
			Terjadi peningkatan partisipasi masyarakat
		Tahap pendampingan	Ada kemajuan dalam implementasi program atau kegiatan
			Terjadi peningkatan koordinasi dan kolaborasi dalam masyarakat
		Tahap kemampuan mandiri	Terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat
			Masyarakat dapat mandiri tanpa

Konsep	Fenomena	Sub-Fenomena	Gejala
			bergantung pada pihak luar
			Program atau kegiatan yang dijalankan dapat berkelanjutan

1.10. Argumentasi Peneliti

Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk yang cukup padat dan berbagai aktivitas industri serta komersial, pengelolaan sampah di Kota Semarang menjadi tantangan besar. Sampah yang sudah semakin menumpuk harus segera diatasi terutama dalam pengelolaannya. Solusi yang relevan dengan kondisi yang ada adalah dengan mengoptimalkan bank sampah karena bank sampah merupakan garda terdepan di lingkungan masyarakat yang dapat mengurangi sampah secara efektif dan efisien. Kehadiran bank sampah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah yang berkelanjutan. Bank sampah menjadi solusi positif karena akan mengurangi jumlah timbulan sampah. Sampah yang sudah dipilah dapat didaur ulang atau diolah menjadi barang yang memiliki nilai jual. Apabila program bank sampah dapat berjalan dengan efektif dan efisien dengan bantuan masyarakat di setiap kelurahan, maka Kota Semarang dapat menjadi lebih bersih dan mengurangi jumlah timbulan sampah yang dibuang. Fokus penelitian ini ingin mengidentifikasi pemberdayaan masyarakat di Bank Sampah Ngudi Lestari Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

1.11. Metode Penelitian

1.11.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Pada penelitian kualitatif, fokus utamanya adalah memperhatikan kejadian dan menggali lebih dalam makna dari kejadian tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh kata dan kalimat yang digunakan. Menurut Basri dalam Dawaman (2025), sampai pada kesimpulan bahwa metode dan signifikansi temuan merupakan penekanan utama penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan

unsur-unsur manusia, objek, dan institusi serta hubungan atau interaksi mereka untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang suatu peristiwa, aktivitas, atau fenomena (Mohamed *et al.*, 2010, dalam Dawaman, 2025).

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama, metode pengumpulan data adalah wawancara, dan analisis data bersifat induktif (berlawanan dengan penelitian eksperimen di mana alat menjadi instrumen utama) (Sugiyono, 2019). Tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif ini adalah untuk mengetahui tentang pemberdayaan masyarakat di Bank Sampah Ngudi Lestari di Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, serta unsur-unsur yang berkontribusi pada dukungan dan penghentian bank sampah. Selain itu, peneliti percaya bahwa metode penelitian kualitatif ini akan sangat cocok untuk pengambilan informasi yang akan dilakukan.

1.11.2. Lokus dan Fokus Penelitian

Tempat di mana penelitian dilakukan disebut sebagai lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini adalah di Bank Sampah Ngudi Lestari yang bertempat di Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Peneliti memilih lokasi tersebut karena selalu ada berbagai permasalahan mendasar yang terjadi di beberapa tempat, termasuk Kelurahan Tinjomoyo. Tujuan dari Bank Sampah adalah untuk mengurangi jumlah sampah yang ada dengan mendaur ulang dan menggunakannya sebagai produk yang dapat menguntungkan ekonomi masyarakat. Bank Sampah Ngudi Lestari juga memiliki keunikan berupa sistem *Gold and Clean*, yaitu sistem yang mengubah sampah menjadi emas.

Penelitian ini akan fokus pada tahapan pemberdayaan masyarakat yang diterapkan oleh pengurus Bank Sampah Ngudi Lestari untuk mengelola sampah dengan maksimal dan bertanggung jawab. Ini mencakup tahap penyadaran masyarakat, tahap pengkapasitasan, tahap pemberian akses, tahap pendampingan, dan tahap kemampuan mandiri. Penelitian ini akan menganalisis sejauh mana pemberdayaan dilakukan di Bank Sampah Ngudi Lestari. Fokus ini juga akan melihat hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat dalam menjalankan program tersebut, seperti kurangnya kesadaran atau fasilitas yang memadai. Penelitian ini juga melihat faktor apa yang mendukung berjalannya Bank Sampah Ngudi Lestari.

1.11.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang dimintai keterangan tentang suatu fakta atau pendapat pribadi. Untuk penelitian ini, subjek harus terkait dengan pemberdayaan masyarakat di Bank Sampah Ngudi Lestari. Pemilihan subjek penelitian menggunakan dua teknik, yaitu *snowball sampling* untuk pengurus Bank Sampah Ngudi Lestari, dengan Ketua RW selaku penanggung jawab sebagai *key informan*. *Snowball sampling* merupakan metode pengambilan sampel yang menggunakan *key-informan* untuk membantu sampel berikutnya (Prihastuty, 2023). Teknik kedua, yaitu *accidental sampling* untuk warga yang menjadi anggota Bank Sampah Ngudi Lestari sebanyak 3 responden. *Accidental sampling* merupakan teknik peneliti mengambil sampel secara kebetulan atau dengan kata lain, secara tidak sengaja dari orang lain selama proses penelitian. (Fadjriyati dan Halimatusadiah, 2022). Tujuan pemilihan subjek tersebut adalah untuk mendapatkan data dari bidang – bidang terkait yang memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menekankan pada penggunaan bahasa deskriptif untuk mengumpulkan data daripada metode numerik atau statistik, sesuai dengan penjelasan jenis dalam penelitian sehingga penelitian ini memiliki subjek yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat.

1.11.4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, kata-kata dan tindakan adalah sumber data. Dokumen dan lain-lain adalah sumber data tambahan (Lofland dan Lofland, 1984, dalam Moleong, 2013). Selain itu, sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Menurut Siyoto & Sodik (2015), data penelitian dibedakan menjadi dua, antara lain :

- a. Data kualitatif, yaitu informasi yang dipresentasikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Melalui wawancara dengan informan, analisis dokumen seperti undang-undang atau peraturan, catatan-catatan permasalahan yang dihadapi, dan sebagainya ini data kualitatif dihasilkan.
- b. Data kuantitatif, yaitu meliputi data yang berupa persentase, jumlah, frekuensi, dan nilai numerik lainnya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan gabungan

dari kedua jenis data di atas guna memperoleh data yang relevan dan memudahkan peneliti dalam proses penelitian.

Sumber data merupakan hal yang sangat penting karena sebagai penunjang penelitian, tetapi juga harus tetap memperhatikan keakuratan dan keaslian dalam mengidentifikasi sumber data. Untuk melengkapi data sebagai sumber bagi peneliti, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu:

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menyelesaikan masalah. Data didapatkan melalui observasi, wawancara, FGD dan kuisioner kepada *stakeholder-stakeholder* terkait.
- b. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk tujuan lain selain menyelesaikan masalah. Sangat mudah untuk menemukan data ini, yaitu dengan literatur, makalah, jurnal, situs web di internet, undang – undang, data BPS dan lainnya yang memang terkait dengan penelitian digunakan sebagai sumber data sekunder dalam penelitian ini.

1.11.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini, menggunakan berbagai teknik yang dirancang untuk mendapatkan wawasan mendalam dan holistik tentang pemberdayaan masyarakat di Bank Sampah Ngudi Lestari. Berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan:

1. Observasi adalah suatu kegiatan memperhatikan suatu proses atau objek dengan tujuan mengamati dan kemudian memahami pengetahuan tentang suatu fenomena berdasarkan pengetahuan dan konsep yang telah dimiliki sebelumnya untuk memperoleh data yang diperlukan untuk melanjutkan penelitian.
2. Wawancara adalah proses pengumpulan informasi melalui tanya jawab secara lisan. Informasi yang diperoleh dinyatakan dalam bentuk tulisan, audio, video, atau rekaman audio visual. Metode utama yang digunakan dalam penelitian pengamatan adalah wawancara.
3. Analisis Dokumen melibatkan pengumpulan dan evaluasi berbagai dokumen, kejadian yang tercatat, tergambar, ataupun terekam.

Oleh karena itu, semua data penelitian yang dikumpulkan melalui kegiatan observasi dan wawancara dapat dilengkapi dengan informasi dari dokumen-dokumen yang diteliti.

1.11.6. Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Sugiyono (2019), analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan baik selama proses pengumpulan data maupun setelah pengumpulan data selesai. Jika data yang dikumpulkan tampak kurang memuaskan, peneliti dapat terus mengumpulkan lebih banyak data sampai mereka merasa bahwa data yang mereka kumpulkan benar-benar relevan dan memenuhi harapan. Miles dan Huberman menawarkan teknik analisis data kualitatif berikut dalam Sugiyono (2019):

1. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (tringulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada awal peneliti melakukan penjelasan secara umum terhadap situasi sosial atau obyek yang diteliti, semua yang dilihat, didengar, dan direkam. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan bervariasi.
2. Reduksi data adalah jenis analisis yang melibatkan kategorisasi, menghapus informasi yang tidak relevan, dan mengatur data untuk menarik kesimpulan. Reduksi data akan memungkinkan peneliti untuk memperoleh lebih banyak data karena akan membuat dan memberikan gagasan yang lebih jelas.
3. Penyajian data dapat dilakukan berbentuk uraian singkat, flowchart, bagan, hubungan antar kategori dan lainnya. Dalam penelitian kualitatif biasanya menyajikan data menggunakan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami situasi apa yang sedang dihadapi dan membuat perencanaan kerja selanjutnya sesuai dengan data dan yang telah dipahami.
4. Kesimpulan dan verifikasi data kesimpulan awal masih sementara dan akan berubah seiring dengan bukti baru yang ditemukan dan didukung selama pengumpulan data. Kesimpulan awal ini bersifat kredibel jika didukung oleh bukti yang valid dan konsisten selama pengumpulan data di lapangan. Kesimpulan dari penelitian kualitatif adalah temuan baru.

1.11.7. Kualitas dan Validasi Data

Alat ukur yang tepat, akurat, dan dapat diandalkan yang juga dikenal sebagai validitas diperlukan untuk proses penelitian. Validitas adalah matriks yang digunakan dalam proses penelitian untuk mengukur kebenaran. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian haruslah terstandarisasi dan menjadi acuan untuk mengukur data yang akan diteliti karena tidak mengukur atau melakukan apa yang seharusnya dilakukan, skala pengukuran yang tidak tepat tidak ada gunanya bagi peneliti. Dalam penelitian tentang pemberdayaan masyarakat di Bank Sampah Ngudi Lestari, peneliti ingin memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan bisa dipercaya. Ini sangat penting agar hasil penelitian benar - benar mencerminkan apa yang dialami dan diungkapkan oleh masyarakat sekitar Bank Sampah Ngudi Lestari dan Pengurus Bank Sampah Ngudi Lestari. Peneliti akan melakukan observasi langsung ke lapangan untuk melihat dengan saksama bagaimana pemberdayaan masyarakat dilaksanakan di Bank Sampah Ngudi Lestari dan aspek-aspek apa saja yang menjadi penghambat serta pendukung dalam pemberdayaan masyarakat. Setelah melakukan observasi peneliti akan melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar Bank Sampah Ngudi Lestari dan juga pengurus Bank Sampah Ngudi Lestari. Wawancara berisi pertanyaan terbuka agar peneliti dan informan dapat merasa nyaman. Selain itu peneliti memeriksa dokumen – dokumen yang berisi tentang pemberdayaan masyarakat di Bank Sampah Ngudi Lestari. Dengan melihat data dari berbagai sudut agar dapat memastikan kebenaran informasi dan fakta di lapangan agar lebih relevan. Peneliti memikirkan kembali apa yang dengar dan lihat hal ini membantu memahami data dengan lebih baik.